

**PELAKSANAAN JAMINAN HAK MEMILIH BAGI  
WARGA NEGARA MELALUI METODE PEMUTAKHIRAN DATA  
OLEH KPU KOTA PADANG  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT TAHUN 2020 DI KOTA PADANG**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas



**MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
TAHUN  
2024**

**ABSTRAK**

Nama : Rika Yanita Susanti  
Program Studi : Magister Ilmu Politik  
Judul : Pelaksanaan Jaminan Hak Memilih Bagi Warga Negara Melalui Metode Pemutakhiran Data Oleh KPU Kota Padang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Di Kota Padang

Pelaksanaan jaminan hak memilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memegang peran krusial dalam mengokohkan fondasi demokrasi dan pemerintahan yang inklusif di tingkat provinsi. Gubernur dan Wakil Gubernur bukan sekadar pemimpin terpilih, tetapi juga perwakilan langsung dari keinginan dan aspirasi warga provinsi. Hak memilih bagi warga negara Indonesia dalam konteks pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebenarnya telah mendapatkan jaminan yang kuat dalam berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengakui hak pilih sebagai hak dasar warga negara, dan hal ini juga tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelaskan dalam Pasal 57 ayat (2) untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara harus terdaftar sebagai pemilih, apabila tidak terdaftar sebagai pemilih, maka pada saat melakukan pemilihan dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el. Permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana implementasi kebijakan terkait pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kota Padang pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020? Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan terkait pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kota Padang pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Penelitian kualitatif ini menekankan pada ke dalaman permasalahan (kualitas) bukan seberapa banyak masalah (kuantitas). Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan hak memilih KPU Kota Padang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai perbedaan tafsiran, sehingga KPU Kota Padang melahirkan kebijakan pengkodean yang disebut dengan kode 5 (lima). Kebijakan tersebut diambil dan dirumuskan pada saat KPU Kota Padang melakukan rapat pleno dengan alasan pada saat pemilu sebelumnya, KPU Kota Padang menemukan banyaknya pemilih yang tidak dikenal pada saat proses clik dilakukan. Adapun pengkodean atau pengklasifikasian kategori 5 tersebut sebagai berikut : 1). Rumah Gusuran, 2). Rumah Kontrakan/Kos-Kosan, 3). Tempat Tinggal tidak ditemui/alamat tidak jelas, 4). Rumah Kosong, 5). Rumah Wilayah Perbatasan, 6). Lapas, 7). Merantau, 8). Alamat Luar Wilayah Kelurahan.

**Kata Kunci : Jaminan Hak memilih, Pemutakhiran Data Pemilih, Kode 5 (lima)**

## ABSTRACT

Name : Rika Yanita Susanti  
Study Program : Master of Political Science  
Title : Implementation of Guaranteed Voting Rights for Citizens Through the Data Updating Method by the City KPU Padang in the Election of Governor and Deputy Governor West Sumatra in 2020 in Padang City

The implementation of guaranteed voting rights in the election of Governor and Deputy Governor plays a crucial role in strengthening the foundations of democracy and inclusive governance at the provincial level. The Governor and Deputy Governor are not just elected leaders, but also direct representatives of the wishes and aspirations of the citizens of the province. The right to vote for Indonesian citizens in the context of the election of Governor and Deputy Governor has actually received strong guarantees in various legal instruments. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) recognizes the right to vote as a basic right of citizens, and this is also stated in Article 43 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 Replacing Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors explains in Article 57 paragraph (2) that in order to exercise the right to vote, citizens must be registered as voters, If you are not registered as a voter, you can exercise your right to vote when voting by showing your e-KTP. The problem in this research is how to implement policies related to updating voter data by the Padang City KPU after the issuance of the Constitutional Court Decision Number: 20/PUU-XVII/2019 in the 2020 West Sumatra Governor and Deputy Governor election? The purpose of this research is to understand and describe how policies are implemented regarding updating voter data by the Padang City KPU after the issuance of the Constitutional Court Decision Number: 20/PUU-XVII/2019 in the 2020 election for Governor and Deputy Governor of West Sumatra. This research is research using qualitative approach with case study type. This qualitative research emphasizes the depth of the problem (quality) rather than how many problems there are (quantity). From the results of this research, researchers found that in the implementation of the Padang City KPU's right to vote on the Constitutional Court's decision there were different interpretations, so that the Padang City KPU gave birth to a coding policy called code 5 (five). This policy was taken and formulated when the Padang City KPU held a plenary meeting on the grounds that during the previous election, the Padang City KPU discovered that there were many unknown voters when the coklik process was carried out. The coding or classification of category 5 is as follows: 1). Eviction House, 2). Rented house/boarding house, 3). Residence not found/address unclear, 4). Empty House, 5). Border Area House, 6). Prisons, 7). Merantau, 8). Address outside the sub-district area.

**Keywords: Guarantee of the right to vote, Updating Voter Data, Code 5 (five)**